



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 53 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pasal 10 ayat 3 perihal penggunaan Data Terpadu dalam Penanganan Fakir Miskin;
  - b. bahwa data terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu merupakan sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program penanganan Fakir Miskin di wilayah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data terpadu yang transparan dan sesuai dengan prosedur maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pemanfaatan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BANJARMASIN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
5. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian/gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi kebutuhan lainnya seperti membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
8. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah Data hasil pendataan yang dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
9. Verifikasi adalah proses pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.

10. Validasi adalah suatu tindakan menetapkan kesahihan data.
11. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
12. Penanganan kemiskinan adalah suatu bentuk usaha / program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
13. Pemohon adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan warga Negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan data untuk Program Penanganan Fakir Miskin dan/atau kepentingan akademik.
14. Institusi yang ditunjuk adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini sebagai dasar dan acuan dalam pemanfaatan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga penanganan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat Kota Banjarnasin.

### BAB III

#### PEMANFAATAN DATA DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang sudah dimutakhirkan, sudah diverifikasi dan divalidasi dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan utama penetapan sasaran program penanganan Kemiskinan oleh instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam ruang lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin dan unit kerja terkecil di bawahnya.

##### Pasal 5

Data terpadu juga dapat dimanfaatkan untuk :

- a. melaksanakan analisis atau perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- b. evaluasi dan penilaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kemiskinan di wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin.

##### Pasal 6

Selain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang melaksanakan program Penanganan Kemiskinan, Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PFM dan OTM) juga dapat digunakan dan diakses oleh unsur-unsur sebagai berikut :

- a. instansi vertikal yang melaksanakan program Penanganan Kemiskinan;
- b. badan usaha, pihak swasta di wilayah Kota Banjarmasin yang turut melaksanakan program terkait penanganan kemiskinan; dan
- c. perseorangan, warga Kota Banjarmasin yang memerlukan data untuk kepentingan ilmiah/penelitian atau bantuan sosial lainnya.

## Pasal 7

Data terpadu yang bisa dimanfaatkan dan diakses berupa

- a. data kepala rumah tangga yang memuat informasi lengkap nama, alamat, sosial, ekonomi dan demografi;
- b. data anggota rumah tangga yang memuat lengkap informasi nama, alamat, sosial, ekonomi dan demografi;
- c. data rumah tangga yang hanya memuat informasi nama dan alamat;
- d. data anggota rumah tangga yang hanya memuat informasi informasi nama dan alamat;
- e. rekapitulasi data.

## Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan penentuan sasaran program terdapat warga miskin dan tidak mampu belum terdaftar di Data Terpadu, maka harus dilakukan verifikasi dan validasi segera untuk diidentifikasi kondisi kesejahteraan rumah tangganya oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

## BAB IV

### MEKANISME PEMANFAATAN DATA TERPADU

## Pasal 9

Mekanisme pemanfaatan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lembaga terkait, pemerintah daerah dan/atau masyarakat mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin;
- b. Pemohon data menandatangani berita acara serah terima data; dan
- c. Penyerahan data dari Kepala Dinas Sosial kepada Pemohon Data berupa *softcopy*, *hardcopy* data dan hak akses ke aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial.

## Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri atas spesifikasi data serta jumlah data dan perincian lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon.

## Pasal 11

Pemohon atau pengguna data bertanggung jawab atas data yang sudah diterima. Penyalahgunaan atas data tersebut, menjadi tanggung jawab pengguna data.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Juli 2019  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 53